

## PENOLAKAN UU CIPTA KERJA 2020 (Analisis Schoemacher & Reese Pemberitaan Cnnindonesia.Com)

### *REPUDIATION OF OMNIBUS LAW CIPTA KERJA 2020 (Shoemaker & Reese Analysis of News Coverage Cnnindonesia.Com)*

Ari Cahyo Nugroho<sup>1</sup>, Syarifuddin<sup>2</sup>

Peneliti BPSDMP Kominfo Jakarta<sup>1</sup>, Peneliti BPSDMP Kominfo Banjarmasin<sup>2</sup>

#### **Abstrak**

Omnibus Law pertama kali muncul pada pidato Presiden RI Jokowi saat pelantikannya pada 20 Oktober 2019. Omnibus law adalah sebuah konsep pembentukan undang-undang utama untuk mengatur masalah yang sebelumnya diatur sejumlah UU atau satu UU yang sekaligus merevisi beberapa UU. Undang-undang ini dimaksudkan untuk merampingkan regulasi dari segi jumlah agar lebih tepat sasaran. Tentunya media sangat memiliki keterkaitan dengan pemberitaan di atas. Media dianggap bisa memediasi polemik ini. Media, dalam situasi ini, diperlukan untuk mempertemukan gagasan yang beragam, terutama aspirasi masyarakat. Keterkaitan hal ini dijabarkan dalam Teori Hirarki Pengaruh Pamela J Shoemaker dan Stephen D. Reese (Pamela J Shoemaker dan Stephen D. Reese 1996). Teori ini menjelaskan tentang pengaruh terhadap isi dari suatu pemberitaan media oleh pengaruh internal dan eksternal. Dalam kaitan dengan penulisan ini, keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers. Salah satunya adalah media siber situs berita CNNIndonesia.com. Situs berita CNNIndonesia.com merupakan milik Trans Media. CNNIndonesia.com menyajikan konten lokal dan internasional, dengan fokus pada berita umum, bisnis, olahraga, teknologi dan hiburan. CNNIndonesia.com telah diluncurkan pada 20 Oktober 2014 dengan Yusuf Arifin sebagai pemimpin redaksi. Tulisan ini difokuskan pada keterkaitan Teori Hirarki Pengaruh Pamela J Shoemaker dan Stephen D. Reese dengan pemberitaan Omnibus Law dalam CNNIndonesia.com. Hasil analisa menyebutkan bahwa Media CNNIndonesia.com sangat minim memberitakan bagaimana Omnibus Law membahayakan kebebasan pers dan kerja-kerja jurnalistik itu sendiri. Hal ini semakin menguatkan bahwa media daring (CNNIndonesia.com) memang tak memiliki agenda.

**Kata Kunci:** Analisis Schomacher dan Reese, Pemberitaan.

#### **Abstract**

*The Omnibus Law first appeared in President Jokowi's speech during his inauguration on October 20, 2019. The omnibus law is a concept to form the main law to regulate issues previously regulated by a number of laws or one law that simultaneously revises several laws. This law is intended to streamline regulations in terms of numbers so that they are more targeted. Of course, the media are closely related to this news. The media are considered able to mediate this polemic.*

*The media, in this situation, is needed to bring diverse ideas, especially people's aspiration. This linkage is described in the Hierarchy of Influence Theory of Pamela J Shoemaker and Stephen D. Reese (Pamela J Shoemaker and Stephen D. Reese 1996). This theory explains the effect on the content of media coverage by internal and external influences. In connection with this writing, the existence of cyber media in Indonesia is also part of freedom of opinion, freedom of expression, and freedom of the press. One of them is the cyber media news site CNNIndonesia.com. The CNNIndonesia.com news site is owned by Trans Media. CNNIndonesia.com provides local and international content, with a focus on general news, business, sports, technology, and entertainment. CNNIndonesia.com was launched on 20 October 2014 with Yusuf Arifin as editor-in-chief. This paper focuses on the relationship between Pamela J Shoemaker and Stephen D. Reese's Hierarchical Influence Theory with the reporting of Omnibus Law on CNNIndonesia.com. The results of the analysis show that CNNIndonesia.com media has very little reporting on how the Omnibus Law endangers press freedom and journalistic work itself. This further confirms that online media (CNNIndonesia.com) does not have an agenda.*

**Keyword:** News, Schomacher and Reese Analysis

## PENDAHULUAN

Omnibus Law pertama kali muncul pada pidato Presiden RI Jokowi saat pelantikannya pada 20 Oktober 2019. Omnibus law adalah sebuah konsep pembentukan undang-undang utama untuk mengatur masalah yang sebelumnya diatur sejumlah UU atau satu UU yang sekaligus merevisi beberapa UU. Undang-undang ini dimaksudkan untuk merampaiangkan regulasi dari segi jumlah agar lebih tepat sasaran. Omnibus law (Jawahir Gustav Rizal 2020) yang dikemukakan oleh Presiden Jokowi banyak berkaitan dengan bidang kerja pemerintah di sektor ekonomi. Ada dua omnibus law yang diajukan pemerintah, yaitu Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dan Omnibus Law Perpajakan. Secara keseluruhan, ada 11 klaster yang menjadi pembahasan dalam Omnibus Law RUU Cipta Kerja, yaitu: Penyederhanaan Perizinan Tanah, Persyaratan Investasi, Ketenagakerjaan, Kemudahan dan Perlindungan UMKM, Kemudahan Berusaha, Dukungan Riset Dan Inovasi, Administrasi Pemerintahan, Pengenaan Sanksi, Pengendalian Lahan, Kemudahan Proyek Pemerintah, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Sementara itu, Omnibus Law perpajakan mencakup, Pendanaan Investasi, Sistem Teritori, Subjek Pajak Orang Pribadi, Kepatuhan Wajib Pajak, Keadaan Iklim Berusaha, dan Fasilitas. UU Cipta Kerja, yang baru saja disahkan, terdiri atas 15 bab dan 174 pasal. Di dalamnya mengatur berbagai hal, mulai dari ketenagakerjaan hingga lingkungan hidup. Dalam Rapat paripurna DPR RI pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja yang telah disetujui 7 fraksi yang terdiri dari PDIP, Golkar, Gerindra, NasDem, PKB, PPP dan PAN, namun ada 2 fraksi yang menolak yaitu Partai Demokrat dan PKS. Metode pembentukan UU omnibus law (Fais Yonas Boa 2020) merupakan bentuk revolusi peraturan oleh pemerintah

Dalam pelaksanaannya, terdapat penolakan terhadap UU Omnibus law dari kepala-kepala daerah, mereka menyatakan ketidakadilan yang ada di pasal-pasal Omnibus Law, mulai masalah pesangon, masalah cuti, masalah TKA, masalah outsourcing, masalah upah dan lain-lain. Dan dirasakan pengesahannya itu terlalu cepat untuk sebuah undang-undang yang begitu kompleks dan begitu besar. Penolakan tersebut berasal dari Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil; Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan Hamengkubuwono X; Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar), Sutarmidji; Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar), Sutarmidji; Bupati Bandung Barat Aa Umbara; Bupati Bandung Dadang M Naser; Wali Kota Sukabumi Ahmad Fahmi; Bupati Subang H Ruhimat; Bupati Garut Rudi Gunawan; Bupati Tegal Umi Azizah; Bupati Limapuluh Kota Irfendi Arbi; Wali Kota Malang Sutiaji.

Tentunya media sangat memiliki keterkaitan dengan pemberitaan diatas. Media dianggap bisa memediasi polemik ini. Media, dalam situasi

ini, diperlukan untuk mempertemukan gagasan yang beragam, terutama aspirasi masyarakat. Keterkaitan hal ini dijabarkan dalam Teori Hirarki Pengaruh Pamela J Shoemaker dan Stephen D. Reese (Pamela J Shoemaker dan Stephen D. Reese 1996). Teori ini menjelaskan tentang pengaruh terhadap isi dari dari suatu pemberitaan media oleh pengaruh internal dan eksternal. Shoemaker dan Reese membagi kepada beberapa level pengaruh isi media. Yaitu pengaruh dari individu pekerja media (individual level), pengaruh dari rutinitas media (media routines level), pengaruh dari organisasi media (organizational level), pengaruh dari luar media (outside media level), dan yang terakhir adalah pengaruh ideologi (ideology level) (Pamela J Shoemaker dan Stephen D. Reese 1996).

Dalam kaitan dengan penulisan ini, keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers. Salah satunya adalah media siber situs berita CNNIndonesia.com. Situs berita CNNIndonesia.com merupakan milik Trans Media. CNNIndonesia.com menyajikan konten lokal dan internasional, dengan fokus pada berita umum, bisnis, olahraga, teknologi dan hiburan. CNNIndonesia.com telah diluncurkan pada 20 Oktober 2014 dengan Yusuf Arifin sebagai pemimpin redaksi.

Tulisan ini difokuskan pada keterkaitan Teori Hirarki Pengaruh Pamela J Shoemaker dan Stephen D. Reese dengan dengan pemberitaan Omnibus Law dalam CNNIndonesia.com.

## **METODE PENELITIAN**

### **Teori Hirarki Pengaruh Pamela J Shoemaker dan Stephen D. Reese**

Teori (Pamela J Shoemaker dan Stephen D. Reese 1996) ini menjelaskan tentang pengaruh terhadap isi dari dari suatu pemberitaan media oleh pengaruh internal dan eksternal. Asumsi dari teori ini adalah bagaimana isi pesan media yang disampaikan kepada khalayak adalah hasil pengaruh dari kebijakan internal organisasi media dan pengaruh dari eksternal media itu sendiri. Pengaruh internal pada konten media sebenarnya berhubungan dengan kepentingan dari pemilik media, individu wartawan sebagai pencari berita, rutinitas organisasi media. Sedangkan faktor eksternal yang berpengaruh pada konten media berhubungan dengan para pengiklan, pemerintah masyarakat dan faktor eksternal lainnya. Shoemaker dan Reese membagi kepada beberapa level pengaruh isi media. Yaitu pengaruh dari individu pekerja media (individual level), pengaruh dari rutinitas media (media routines level), pengaruh dari organisasi media (organizational level), pengaruh dari luar media (outside media level), dan yang terakhir adalah pengaruh ideologi (ideology level). Berikut level atau faktor dalam Shoemaker dan Reese (Radita Gora 2015)

1. Faktor Individual. Faktor ini mempengaruhi isi terkait latar belakang profesional dari pengeola media, khususnya para wartawan dan editor. Pengaruh aspek-aspek personal dari pengelola media, aspek-aspek pribadi dari wartawan ikut mempengaruhi pemberitaan yang akan ditampilkan kepada khalayak. Pemberitaan, pembentukan konten media, arah pemberitaan dan unsur-unsur yang diberitakan tidak dapat dilepaskan dari pekerja media atau wartawan. Faktor latar belakang dan karakteristik dari seorang pekerja media menurut Shoemaker dan Reese dibentuk oleh beberapa faktor yaitu masalah

- gender atau jenis kelamin, etnis, orientasi seksual, faktor pendidikan dan dari golongan manakah watawan.
2. Rutinitas Media. Faktor ini berhubungan dengan mekanisme dan proses penentuan berita. Setiap media umumnya mempunyai ukuran sendiri tentang apa yang disebut berita, apa ciri-ciri berita yang baik, atau apa kriteria kelayakan berita. Ukuran tersebut adalah rutinitas yang berlangsung tiap hari dan menjadi prosedur standar bagi pengelola media yang berada di dalamnya. Rutinitas media ini juga berhubungan dengan mekanisme bagaimana berita dibentuk. Ketika ada sebuah peristiwa penting yang harus diliput, bagaimana bentuk pendelegasian tugasnya, melalui proses dan tangan siapa saja tulisan sebelum sampai ke proses cetak atau pesan elektronik, siapa penulis, editor dan sebagainya.
  3. Organisasi media. Faktor ini masuk dalam level organisasi berhubungan dengan struktur organisasi yang bisa mempengaruhi pemberitaan. Pengelola media dan wartawan bukan orang tunggal yang ada dalam organisasi berita, sebaliknya hanya bagian kecil dari organisasi media itu. Masing-masing komponen dalam organisasi media bisa jadi mempunyai kepentingan sendiri-sendiri.
  4. Pengaruh ekstra media. Pada tingkat ini faktor-faktor yang mempengaruhi content media antara lain sumber-sumber informasi yang dijadikan isi media (kelompok kepentingan dalam masyarakat), sumber-sumber pendapatan media (pengiklan dan khalayak) serta institusi sosial lainnya.
  5. Level ideologi. Pada tingkat ideologi, yang ingin diamati adalah bagaimana media berfungsi sebagai kepanjangan tangan kepentingan

kekuatan dominan dalam masyarakat, bagaimana rutinitas media, nilai-nilai dan struktur organisasi bisa berjalan di dalamnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berikut beberapa analisa dan pembahasan antara pemberitaan Omnibus Law CNNIndonesia.com dengan Teori yang dikemukakan oleh Teori Hirarki Pengaruh Pamela J Shoemaker dan Stephen D. Reese (Pamela J Shoemaker dan Stephen D. Reese 1996)

NO	JUDUL BERITA	ISI BERITA
1	Buruh dan Mahasiswa Bergerak Kepung Istana, Demo Omnibus Law  CNN Indonesia   Selasa, 10/11/2020 06:51 WIB  <a href="https://www.cnnindonesia.com/">https://www.cnnindonesia.com/</a>	Jakarta, CNN Indonesia -- Massa buruh yang tergabung dalam Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak), serta sejumlah Aliansi Mahasiswa, petani, hingga elemen masyarakat dari kalangan pemuda dan perempuan pejuang akan berdemonstrasi di seberang Istana Negara siang ini, Selasa (10/11). Kegiatan ini dilakukan aliansi buruh dan masyarakat bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan demi memperjuangkan penolakan terhadap Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 atau Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja. Juru Bicara Gebrak, Jumisih menyebut diperkirakan akan ada 10 ribu massa yang bergabung untuk mengepung Istana Negara hari ini. Mereka akan melakukan

<p>nasional/202011 10063732-20- 567867/buruh- dan-mahasiswa- bergerak- kepong-istana- demo-omnibus- law</p>	<p>longmarch dari titik kumpul di kantor ILO (International Labour Organization) ke Istana Negara. "Iya benar, rencana ada sekitar 10 ribu massa, ini atas nama GEBRAK, jadi ada buruh, petani, mahasiswa, pemuda, perempuan juga," kata Jumisih saat dikonfirmasi CNNIndonesia.com melalui pesan singkat. Aksi kata Jumisih akan dimulai tepat pukul 10.00 WIB dari depan Kantor ILO dan berlanjut serta dipusatkan di depan Istana Negara. Tuntutan para buruh pun kata Jumisih tetap sama yakni pembatalan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020. Mereka juga akan menyampaikan propaganda berkaitan dengan kenaikan Upah Minimum yang jika sesuai surat edaran Menteri Tenaga Kerja tak akan naik tahun depan. Aksi buruh yang digelar hari ini semula direncanakan hanya akan berupa gerakan mogok kerja di tempat masing-masing. Namun, kegiatan itu diubah demi pengumpulan kekuatan dan agar aspirasi bisa lebih didengar oleh pemerintah. Sebenarnya, aksi demonstrasi tak hanya dilakukan oleh buruh yang tergabung dalam Gebrak dan elemen mahasiswa serta masyarakat lainnya, buruh yang tergabung dalam KSPI juga akan menggelar demonstrasi di depan kantor Kementerian Tenaga Kerja yang berada di</p>
---	---



		<p>kawasan Gatot Subroto. Juru Bicara KSPI, Kahar S Cahyono mengatakan aksi hanya akan digelar di depan Kemenaker. Massa KSPI tak akan bergerak ke Istana Negara dalam demonstrasi yang mulai digelar tepat pukul 10.30 WIB itu. "Kami hanya fokus di Kemenaker," kata Kahar.</p>
	<p>Faktor Individual.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Faktor ini mempengaruhi isi terkait latar belakang profesional dari pengeola media, khususnya para wartawan dan editor. Pengaruh aspek-aspek personal dari pengelola media, aspek-aspek pribadi dari wartawan ikut mempengaruhi pemberitaan yang akan ditampilkan kepada khalayak.</li> <li>2. Dalam latar belakang pengelola media, tidak terlihat dalam tulisan pemberitaan.</li> <li>3. Dalam pemberitaan diatas, CNNIndonesia.com memberikan ruang bagi pernyataan-pernyataan yang menolak omnibus law.</li> <li>4. Berita diatas merupakan sentimen negatif kontra pemerintah dengan tidak mengakomodasi suara dari pemerintah.</li> <li>5. Dalam berita narasumber yang dihadirkan hanya dua yakni Juru Bicara Gebrak,</li> </ol>

		<p>Jumisih; dan Juru Bicara KSPI, Kahar S Cahyono keduanya menunjukkan statement informatif, deskriptif, dan menunjukkan sikap secara eksplisit kontra terhadap Omnibus Law.</p> <p>6. Pemberitaan diatas yakni CNNIndonesia.com, belum menjadi ruang dialogis atas polemik Omnibus Law. Pemberitaan diatas CNNIndonesia.com memberi ruang bagi pembahasan yang bersifat informatif mengenai proses administratif Omnibus Law ketimbang memediasi gagasan yang beragam.</p> <p>7. Dari segi komposisi narasumber berita diatas. Hanya ada dua yakni Buruh, adalah pihak yang paling banyak diberi panggung oleh media. Sementara itu, pemerintah tidak mendapat ruang.</p> <p>8. Narasumber yang paling banyak berkontribusi pada sentimen negatif, Buruh adalah pihak yang paling berkepentingan atas adanya omnibus law.</p> <p>9. Terlihat komposisi kubu kontra omnibus law adalah Buruh.</p> <p>10. Dari sebaran topik pembahasan, hanya</p>
--	--	---

		ada Buruh yang bisa diindikasikan adalah tidak terciptanya dialog antara Buruh dan Pemerintah.
	Rutinitas Media	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Faktor ini berhubungan dengan mekanisme dan proses penentuan berita. Setiap media umumnya mempunyai ukuran sendiri tentang apa yang disebut berita, apa ciri-ciri berita yang baik, atau apa kriteria kelayakan berita. Ukuran tersebut adalah rutinitas yang berlangsung tiap hari dan menjadi prosedur standar bagi pengelola media yang berada di dalamnya. Rutinitas media ini juga berhubungan dengan mekanisme bagaimana berita dibentuk. Ketika ada sebuah peristiwa penting yang harus diliput, bagaimana bentuk pen delegasian tugasnya, melalui proses dan tangan siapa saja tulisan sebelum sampai ke proses cetak atau pesan elektronik, siapa penulis, editor dan sebagainya.</li><li>2. Dalam mekanisme atau proses penentuan berita, tampak berita CNNIndonesia.com merupakan berita online yang menuntut kecepatan dalam pemberitaan. Terlihat</li></ol>

		<p>mekanisme dan proses, yakni terlihat judul, nama wartawan peliput, dan editor pada berita.</p>
	Organisasi media.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Faktor ini masuk dalam level organisasi berhubungan dengan struktur organisasi yang bisa mempengaruhi pemberitaan. Pengelola media dan wartawan bukan orang tunggal yang ada dalam organisasi berita, sebaliknya hanya bagian kecil dari organisasi media itu. Masing-masing komponen dalam organisasi media bisa jadi mempunyai kepentingan sendiri-sendiri.</li><li>2. Dalam organisasi media, terlihat susunan organisasi CNNIndonesia.com dalam website, namun tidak dalam tulisan yang sedang diulas.</li></ol>
	Pengaruh ekstra media.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Faktor yang mempengaruhi content media antara lain sumber-sumber informasi yang dijadikan isi media (kelompok kepentingan dalam masyarakat), sumber-sumber pendapatan media (pengiklan dan khalayak) serta institusi sosial lainnya.</li><li>2. Dalam pengaruh ekstra media, tidak terlihat kelompok kepentingan di dalam</li></ol>

		pemberitaannya..
	Level ideologi.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pada tingkat ideologi, bagaimana media berfungsi sebagai kepanjangan tangan kepentingan kekuatan dominan dalam masyarakat, bagaimana rutinitas media, nilai-nilai dan struktur organisasi bisa berjalan di dalamnya.</li> <li>2. Dalam level ideologi, tampak dari pemberitaan CNNIndonesia.com memberikan ruang bagi pernyataan-pernyataan yang menolak omnibus law. Berita dengan sentimen negatif kontra pemerintah dengan tidak mengakomodasi suara dari pemerintah.</li> <li>3. Dalam berita narasumber yang dihadirkan hanya dua yakni Juru Bicara Gebrak, Jumisih; dan Juru Bicara KSPI, Kahar S Cahyono keduanya menunjukkan statement informatif, deskriptif, dan menunjukkan sikap secara eksplisit kontra terhadap Omnibus Law.</li> <li>4. Dari segi komposisi narasumber. Hanya ada dua yakni Buruh, adalah pihak yang paling banyak diberi panggung oleh media. Sementara itu, pemerintah tidak</li> </ol>

		<p>mendapat ruang.</p> <p>5. Narasumber yang paling banyak berkontribusi pada sentimen negatif, Buruh adalah pihak yang paling berkepentingan atas adanya omnibus law.</p> <p>6. Terlihat komposisi kubu kontra omnibus law adalah Buruh.</p> <p>7. Dari sebaran topik pembahasan, hanya ada Buruh yang bisa diindikasikan adalah tidak terciptanya dialog antara Buruh dan Pemerintah.</p>
NO	JUDUL BERITA	ISI BERITA
2	<p>Massa Buruh Demo Tolak Omnibus Law Mulai Tiba di Monas</p> <p>CNN Indonesia  Selasa, 10/11/2020 11:06 WIB</p>	<p>Jakarta, CNN Indonesia -- Massa buruh dari Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik dan Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (LEM SPSI) mulai mendatangi kawasan Patung Kuda Arjuna Wiwaha di dekat kawasan Monas, Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Mereka akan menggelar demonstrasi menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja yang telah disahkan Presiden Joko Widodo. Ketua Umum LEM SPSI, Arif Minardi mengatakan unjuk rasa kali ini adalah kelanjutan dari yang pernah dilakukan beberapa waktu lalu. Dia berharap pemerintah</p>

<p><a href="https://www.cnindonesia.com/nasional/20201110105553-20-567975/massa-buruh-demo-tolak-omnibus-law-mulai-tiba-di-monas">https://www.cnindonesia.com/nasional/20201110105553-20-567975/massa-buruh-demo-tolak-omnibus-law-mulai-tiba-di-monas</a></p>	<p>mendengarkan aspirasi buruh di peringatan hari pahlawan. "Ini kelanjutan aksi kami, masih berkaitan dengan penolakan omnibus law, kami tidak memilih judicial review karena kita lihat lembaga negara ini sudah apa namanya kurang atau tidak dapat dipercaya lagi," kata Arif di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa (10/11). Arif mengatakan unjuk rasa memang sengaja digelar bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan. Dia berharap pemerintah tergerak untuk mengabulkan aspirasi masyarakat yang berunjuk rasa menolak Omnibus Law di Hari Pahlawan. Arif berharap Presiden Jokowi lekas menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) untuk membatalkan Omnibus Law UU Cipta Kerja. "Kami harap pemerintah legowo lah. Legowo, dia sadar bahwa memang hampir semua masyarakat mayoritas menolak," kata dia. Selain LEM SPSI, massa yang akan menggelar aksi di sekitar patung kuda dan Istana Negara adalah massa dari Gerakan Aksi Bersama Rakyat (Gebrak). Mereka dijadwalkan akan melakukan longmarch dari depan Gedung ILO ke depan Istana Negara. Pantauan CNNIndonesia.com, masih belum ada pengamanan ketat di sekitar Monumen Nasional, Jakarta. Massa buruh yang hadir untuk berunjuk</p>
--	---

		rasa juga belum terlalu banyak, sehingga lalu lintas masih lancar.
	Faktor Individual.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Faktor ini mempengaruhi isi terkait latar belakang profesional dari pengeola media, khususnya para wartawan dan editor. Pengaruh aspek-aspek personal dari pengelola media, aspek-aspek pribadi dari wartawan ikut mempengaruhi pemberitaan yang akan ditampilkan kepada khalayak.</li><li>2. Dalam latar belakang pengelola media, tidak terlihat dalam tulisan pemberitaan.</li><li>3. Dalam pemberitaan diatas, CNNIndonesia.com memberikan ruang bagi pernyataan-pernyataan yang menolak omnibus law.</li><li>4. Berita diatas merupakan sentimen negatif kontra pemerintah dengan tidak mengakomodasi suara dari pemerintah.</li><li>5. Dalam berita narasumber yang dihadirkan hanya satu yakni Ketua Umum LEM SPSI, Arif Minardi yang menunjukkan statement informatif, deskriptif, dan menunjukkan sikap secara eksplisit kontra terhadap Omnibus Law.</li></ol>



		<p>6. Pemberitaan diatas yakni CNNIndonesia.com, belum menjadi ruang dialogis atas polemik Omnibus Law.</p> <p>7. Dari segi komposisi narasumber berita diatas. Hanya ada satu yakni Buruh, adalah pihak yang paling banyak diberi panggung oleh media. Sementara itu, pemerintah tidak mendapat ruang.</p> <p>8. Narasumber yang paling banyak berkontribusi pada sentimen negatif, Buruh adalah pihak yang paling berkepentingan atas adanya omnibus law.</p> <p>9. Terlihat komposisi kubu kontra omnibus law adalah Buruh.</p> <p>10. Dari sebaran topik pembahasan, hanya ada Buruh yang bisa diindikasikan adalah tidak terciptanya dialog antara Buruh dan Pemerintah.</p>
	Rutinitas Media.	<p>1. Faktor ini berhubungan dengan mekanisme dan proses penentuan berita. Setiap media umumnya mempunyai ukuran sendiri tentang apa yang disebut berita, apa ciri-ciri berita yang baik, atau apa kriteria kelayakan berita. Ukuran tersebut adalah rutinitas yang berlangsung</p>

		<p>tiap hari dan menjadi prosedur standar bagi pengelola media yang berada di dalamnya. Rutinitas media ini juga berhubungan dengan mekanisme bagaimana berita dibentuk. Ketika ada sebuah peristiwa penting yang harus diliput, bagaimana bentuk pendelegasian tugasnya, melalui proses dan tangan siapa saja tulisan sebelum sampai ke proses cetak atau pesan elektronik, siapa penulis, editor dan sebagainya.</p> <p>2. Dalam mekanisme atau proses penentuan berita, tampak berita CNNIndonesia.com merupakan berita online yang menuntut kecepatan dalam pemberitaan. Terlihat mekanisme dan proses, yakni terlihat judul, nama wartawan peliput, dan editor pada berita.</p>
	Organisasi media.	<p>1. Faktor ini masuk dalam level organisasi berhubungan dengan struktur organisasi yang bisa mempengaruhi pemberitaan. Pengelola media dan wartawan bukan orang tunggal yang ada dalam organisasi berita, sebaliknya hanya bagian kecil dari organisasi media itu. Masing-masing komponen dalam organisasi media bisa</p>

		<p>jadi mempunyai kepentingan sendiri-sendiri.</p> <p>2. Dalam organisasi media, terlihat susunan organisasi CNNIndonesia.com dalam website, namun tidak dalam tulisan yang sedang diulas.</p>
	Pengaruh ekstra media.	<p>1. Faktor yang mempengaruhi content media antara lain sumber-sumber informasi yang dijadikan isi media (kelompok kepentingan dalam masyarakat), sumber-sumber pendapatan media (pengiklan dan khalayak) serta institusi sosial lainnya.</p> <p>2. Dalam pengaruh ekstra media, tidak terlihat kelompok kepentingan di dalam pemberitaannya..</p>
	Level ideologi.	<p>1. Pada tingkat ideologi, bagaimana media berfungsi sebagai kepanjangan tangan kepentingan kekuatan dominan dalam masyarakat, bagaimana rutinitas media, nilai-nilai dan struktur organisasi bisa berjalan di dalamnya.</p> <p>2. Dalam level ideologi, tampak dari pemberitaan CNNIndonesia.com memberikan ruang bagi pernyataan-pernyataan yang menolak omnibus law.</p>

		<p>Berita dengan sentimen negatif kontra pemerintah dengan tidak mengakomodasi suara dari pemerintah.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>3. Dalam berita narasumber yang dihadirkan hanya satu yakni Ketua Umum LEM SPSI, Arif Minardi, menunjukkan statement informatif, deskriptif, dan menunjukkan sikap secara eksplisit kontra terhadap Omnibus Law.</li><li>4. Dari segi komposisi narasumber. Hanya ada satu yakni Buruh, adalah pihak yang paling banyak diberi panggung oleh media. Sementara itu, pemerintah tidak mendapat ruang.</li><li>5. Narasumber yang paling banyak berkontribusi pada sentimen negatif, Buruh adalah pihak yang paling berkepentingan atas adanya omnibus law.</li><li>6. Terlihat komposisi kubu kontra omnibus law adalah Buruh.</li><li>7. Dari sebaran topik pembahasan, hanya ada Buruh yang bisa diindikasikan adalah tidak terciptanya dialog antara Buruh dan Pemerintah.</li></ol>
--	--	---

NO	JUDUL BERITA	ISI BERITA
3	Aksi Tolak Omnibus Law Bubar Usai Buruh Bertemu Pimpinan DPR  CNN Indonesia   Senin, 09/11/2020 17:20 WIB  <a href="https://www.cnindonesia.com/nasional/20201109171353-20-567733/aksi-tolak-omnibus-law-bubar-usai-buruh-bertemu-pimpinan-dpr">https://www.cnindonesia.com/nasional/20201109171353-20-567733/aksi-tolak-omnibus-law-bubar-usai-buruh-bertemu-pimpinan-dpr</a>	Jakarta, CNN Indonesia -- Ribuan massa dari sejumlah elemen buruh yang menuntut pembatalan UU Cipta Kerja di depan kompleks parlemen DPR/MPR langsung membubarkan diri usai perwakilan buruh bertemu dua pimpinan DPR. Sebanyak 15 perwakilan buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bertemu dengan Wakil Ketua DPR Rahmat Gobel dan Ketua Badan Legislasi DPR Supratman Andi Agtas. Berdasarkan pantauan CNNIndonesia.com, massa buruh mulai meninggalkan depan area kompleks parlemen Senin (9/11) sekitar pukul 16.30 WIB, setelah sekitar dua jam menunggu pertemuan wakil buruh dengan dua pimpinan DPR tersebut. Mereka meninggalkan lokasi unjuk rasa secara tertib. Arus lalu lintas di sekitar Jalan Gatot Subroto, Semanggi arah Slipi pun kembali normal. Sebelumnya, lalu lintas di sekitar lokasi Demo sempat tersendat. Buruh memastikan bakal kembali melakukan aksi unjuk rasa serupa, di DPR maupun sekitar Istana untuk menuntut pembatalan UU Nomor 11 Tahun 2020, baik lewat Legislative Review maupun Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu)

		<p>Presiden. Selain itu, rencananya pada Selasa (9/11), buruh juga akan kembali menggelar aksi unjuk rasa di depan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menuntut kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2021. Sekretaris Jenderal KSPI, Riden Hatam Azis memastikan, selain aksi unjuk rasa, buruh juga mengancam akan melakukan aksi mogok kerja di beberapa daerah bila pemerintah tak memenuhi kenaikan UMP 2021. Sejauh ini, Riden menyebut pihaknya telah mengonsolidasikan rencana aksi mogok tersebut, terutama di daerah-daerah seperti DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat yang tak mengalami kenaikan upah. "Namanya upah kan hak individu, hak perorang, hak pekerja. Ketika itu tidak naik, maka dipastikan pemogokan akan terjadi secara daerah maupun nasional," kata dia. "Ketika upah tidak naik kami haqulyaqin kami pastikan akan terjadi pemogokan di daerah-daerah yang gubernurnya tidak menaikkan UMK. Tinggal mengonsolidasi, menentukan hari itu pasti terjadi. Itu sudah tidak perlu lagi disosialisasikan ya," tambahnya.</p>
	Faktor Individual.	1. Faktor ini mempengaruhi isi terkait latar belakang profesional dari pengeola media, khususnya para wartawan dan editor.

		<p>Pengaruh aspek-aspek personal dari pengelola media, aspek-aspek pribadi dari wartawan ikut mempengaruhi pemberitaan yang akan ditampilkan kepada khalayak.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>2. Dalam latar belakang pengelola media, tidak terlihat dalam tulisan pemberitaan.</li><li>3. Dalam pemberitaan diatas, CNNIndonesia.com memberikan ruang bagi pernyataan-pernyataan yang menolak omnibus law.</li><li>4. Berita diatas merupakan sentimen negatif kontra pemerintah dengan tidak mengakomodasi suara dari pemerintah.</li><li>5. Dalam berita narasumber yang dihadirkan hanya satu yakni Sekretaris Jenderal KSPI, Riden Hatam Azis yang menunjukkan statement informatif, deskriptif, dan menunjukkan sikap secara eksplisit kontra terhadap Omnibus Law.</li><li>6. Pemberitaan diatas yakni CNNIndonesia.com, belum menjadi ruang dialogis atas polemik Omnibus Law.</li><li>7. Dari segi komposisi narasumber berita diatas. Hanya ada satu yakni Buruh,</li></ol>
--	--	--

		<p>adalah pihak yang paling banyak diberi panggung oleh media. Sementara itu, pemerintah tidak mendapat ruang.</p> <p>8. Narasumber yang paling banyak berkontribusi pada sentimen negatif, Buruh adalah pihak yang paling berkepentingan atas adanya omnibus law.</p> <p>9. Terlihat komposisi kubu kontra omnibus law adalah Buruh.</p> <p>10. Dari sebaran topik pembahasan, hanya ada Buruh yang bisa diindikasikan adalah tidak terciptanya dialog antara Buruh dan Pemerintah.</p>
	<p>Rutinitas Media.</p>	<p>1. Faktor ini berhubungan dengan mekanisme dan proses penentuan berita. Setiap media umumnya mempunyai ukuran sendiri tentang apa yang disebut berita, apa ciri-ciri berita yang baik, atau apa kriteria kelayakan berita. Ukuran tersebut adalah rutinitas yang berlangsung tiap hari dan menjadi prosedur standar bagi pengelola media yang berada di dalamnya. Rutinitas media ini juga berhubungan dengan mekanisme bagaimana berita dibentuk. Ketika ada</p>



		<p>sebuah peristiwa penting yang harus diliput, bagaimana bentuk pendelegasian tugasnya, melalui proses dan tangan siapa saja tulisan sebelum sampai ke proses cetak atau pesan elektronik, siapa penulis, editor dan sebagainya.</p> <p>2. Dalam mekanisme atau proses penentuan berita, tampak berita CNNIndonesia.com merupakan berita online yang menuntut kecepatan dalam pemberitaan. Terlihat mekanisme dan proses, yakni terlihat judul, nama wartawan peliput, dan editor pada berita.</p>
	<p>Organisasi media.</p>	<p>1. Faktor ini masuk dalam level organisasi berhubungan dengan struktur organisasi yang bisa mempengaruhi pemberitaan. Pengelola media dan wartawan bukan orang tunggal yang ada dalam organisasi berita, sebaliknya hanya bagian kecil dari organisasi media itu. Masing-masing komponen dalam organisasi media bisa jadi mempunyai kepentingan sendiri-sendiri.</p> <p>2. Dalam organisasi media, terlihat susunan organisasi CNNIndonesia.com dalam website, namun tidak dalam tulisan yang</p>

		sedang diulas.
	Pengaruh ekstra media.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Faktor yang mempengaruhi content media antara lain sumber-sumber informasi yang dijadikan isi media (kelompok kepentingan dalam masyarakat), sumber-sumber pendapatan media (pengiklan dan khalayak) serta institusi sosial lainnya.</li> <li>2. Dalam pengaruh ekstra media, tidak terlihat kelompok kepentingan di dalam pemberitaannya..</li> </ol>
	Level ideologi.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pada tingkat ideologi, bagaimana media berfungsi sebagai kepanjangan tangan kepentingan kekuatan dominan dalam masyarakat, bagaimana rutinitas media, nilai-nilai dan struktur organisasi bisa berjalan di dalamnya.</li> <li>2. Dalam level ideologi, tampak dari pemberitaan CNNIndonesia.com memberikan ruang bagi pernyataan-pernyataan yang menolak omnibus law. Berita dengan sentimen negatif kontra pemerintah dengan tidak mengakomodasi suara dari pemerintah.</li> <li>3. Dalam berita narasumber yang dihadirkan hanya satu yakni Sekretaris Jenderal KSPI,</li> </ol>

		<p>Riden Hatam Azis, menunjukkan statement informatif, deskriptif, dan menunjukkan sikap secara eksplisit kontra terhadap Omnibus Law.</p> <p>4. Dari segi komposisi narasumber. Hanya ada satu yakni Buruh, adalah pihak yang paling banyak diberi panggung oleh media. Sementara itu, pemerintah tidak mendapat ruang.</p> <p>5. Narasumber yang paling banyak berkontribusi pada sentimen negatif, Buruh adalah pihak yang paling berkepentingan atas adanya omnibus law.</p> <p>6. Terlihat komposisi kubu kontra omnibus law adalah Buruh.</p> <p>7. Dari sebaran topik pembahasan, hanya ada Buruh yang bisa diindikasikan adalah tidak terciptanya dialog antara Buruh dan Pemerintah.</p>
NO	JUDUL BERITA	ISI BERITA
4	Di DPR, Buruh Ajak PKS-Demokrat	Jakarta, CNN Indonesia -- Sejumlah elemen buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengajak fraksi PKS

<p>Legislatif                  Review UU                  Ciptaker</p> <p>CNN Indonesia                    Senin,                  09/11/2020 12:25                  WIB</p> <p><a href="https://www.cn&lt;br/&gt;                 nindonesia.com/&lt;br/&gt;                 nasional/202011&lt;br/&gt;                 09120639-20-&lt;br/&gt;                 567560/di-dpr-&lt;br/&gt;                 buruh-ajak-pks-&lt;br/&gt;                 demokrat-&lt;br/&gt;                 legislatif-&lt;br/&gt;                 review-uu-&lt;br/&gt;                 ciptaker">https://www.cn                  nindonesia.com/                  nasional/202011                  09120639-20-                  567560/di-dpr-                  buruh-ajak-pks-                  demokrat-                  legislatif-                  review-uu-                  ciptaker</a></p>	<p>dan Demokrat mengajukan legislative review untuk mencabut UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Hal itu diungkapkan Sekretaris Jenderal KSPI, Rideb Batam Azis di tengah aksi unjuk rasa yang mereka gelar di depan kompleks DPR/MPR, Senin (9/11). "Kepada fraksi PKS, kepada fraksi Demokrat kami berharap bersama-sama seluruh masyarakat Indonesia menginisiasi melakukan untuk mengadakan (legislative) review terhadap UU Nomor 11/2020 ini," kata Riden kepada wartawan di lokasi aksi. Kelompok buruh, kata Riden, mengucapkan terima kasih ke sikap kedua partai tersebut yang selama ini tegas menolak Terlepas dari itu, Riden menegaskan bahwa elemen buruh terutama dari KSPI akan terus melakukan perlawanan maraton sampai pemerintah, Presiden dan DPR membatalkan UU penarik investasi tersebut. "Kami dari KSPI dan elemen buruh lainnya akan terus melakukan perlawanan maraton sampai dengan UU nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja ini dibatalkan, sampai dicabut kembali oleh yang berwenang, dalam hal ini kami katakan DPR RI dan Presiden melalui Perppu-nya," ucap Riden. "Kami nanti juga akan melakukan aksi-aksi besar di Istana negara, dalam waktu dekat, untuk meminta Presiden</p>
---	--

		<p>Indonesia membuat Perppu sehingga UU Omnibus Law Nomor 11 tahun 2020 ini dibatalkan," katanya. Sejumlah organisasi buruh kembali menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPR bersamaan dengan sidang paripurna pertama usai reses hari ini, Senin (9/11). Dalam aksinya mereka menuntut dewan legislatif mencabut UU Omnibus Law Ciptaker lewat jalur legislative review dalam sidang paripurna pembukaan masa sidang anggota DPR usai reses. Riden mengklaim bahwa aksi kali ini juga diikuti sejumlah aksi lain di 24 provinsi di Indonesia dengan tuntutan yang sama. "Aksi ini akan terus kami lakukan, di samping juga kami telah melakukan judicial review kepada Mahkamah Konstitusi. Semua ini, semua kesempatan, akan kami gunakan," katanya.</p>
	<p>Faktor Individual.</p>	<p>1. Faktor ini mempengaruhi isi terkait latar belakang profesional dari pengeola media, khususnya para wartawan dan editor. Pengaruh aspek-aspek personal dari pengelola media, aspek-aspek pribadi dari wartawan ikut mempengaruhi pemberitaan yang akan ditampilkan kepada khalayak.</p>

		<ol style="list-style-type: none"><li>2. Dalam latar belakang pengelola media, tidak terlihat dalam tulisan pemberitaan.</li><li>3. Dalam pemberitaan diatas, CNNIndonesia.com memberikan ruang bagi pernyataan-pernyataan yang menolak omnibus law.</li><li>4. Berita diatas merupakan sentimen negatif kontra pemerintah dengan tidak mengakomodasi suara dari pemerintah.</li><li>5. Dalam berita narasumber yang dihadirkan hanya satu yakni Sekretaris Jenderal KSPI, Riden Hatam Azis yang menunjukkan statement informatif, deskriptif, dan menunjukkan sikap secara eksplisit kontra terhadap Omnibus Law.</li><li>6. Pemberitaan diatas yakni CNNIndonesia.com, belum menjadi ruang dialogis atas polemik Omnibus Law.</li><li>7. Dari segi komposisi narasumber berita diatas. Hanya ada satu yakni Buruh, adalah pihak yang paling banyak diberi panggung oleh media. Sementara itu, pemerintah tidak mendapat ruang.</li><li>8. Narasumber yang paling banyak berkontribusi pada sentimen negatif,</li></ol>
--	--	--

		<p>Buruh adalah pihak yang paling berkepentingan atas adanya omnibus law.</p> <p>9. Terlihat komposisi kubu kontra omnibus law adalah Buruh.</p> <p>10. Dari sebaran topik pembahasan, hanya ada Buruh yang bisa diindikasikan adalah tidak terciptanya dialog antara Buruh dan Pemerintah.</p>
	<p>Rutinitas Media.</p>	<p>1. Faktor ini berhubungan dengan mekanisme dan proses penentuan berita. Setiap media umumnya mempunyai ukuran sendiri tentang apa yang disebut berita, apa ciri-ciri berita yang baik, atau apa kriteria kelayakan berita. Ukuran tersebut adalah rutinitas yang berlangsung tiap hari dan menjadi prosedur standar bagi pengelola media yang berada di dalamnya. Rutinitas media ini juga berhubungan dengan mekanisme bagaimana berita dibentuk. Ketika ada sebuah peristiwa penting yang harus diliput, bagaimana bentuk pendelegasian tugasnya, melalui proses dan tangan siapa saja tulisan sebelum sampai ke proses cetak atau pesan elektronik, siapa penulis,</p>

		<p>editor dan sebagainya.</p> <p>2. Dalam mekanisme atau proses penentuan berita, tampak berita CNNIndonesia.com merupakan berita online yang menuntut kecepatan dalam pemberitaan. Terlihat mekanisme dan proses, yakni terlihat judul, nama wartawan peliput, dan editor pada berita.</p>
	Organisasi media.	<p>1. Faktor ini masuk dalam level organisasi berhubungan dengan struktur organisasi yang bisa mempengaruhi pemberitaan. Pengelola media dan wartawan bukan orang tunggal yang ada dalam organisasi berita, sebaliknya hanya bagian kecil dari organisasi media itu. Masing-masing komponen dalam organisasi media bisa jadi mempunyai kepentingan sendiri-sendiri.</p> <p>2. Dalam organisasi media, terlihat susunan organisasi CNNIndonesia.com dalam website, namun tidak dalam tulisan yang sedang diulas.</p>
	Pengaruh ekstra media.	<p>1. Faktor yang mempengaruhi content media antara lain sumber-sumber informasi yang dijadikan isi media (kelompok</p>



		<p>kepentingan dalam masyarakat), sumber-sumber pendapatan media (pengiklan dan khalayak) serta institusi sosial lainnya.</p> <p>2. Dalam pengaruh ekstra media, tidak terlihat kelompok kepentingan di dalam pemberitaannya..</p>
	<p>Level ideologi.</p>	<p>1. Pada tingkat ideologi, bagaimana media berfungsi sebagai kepanjangan tangan kepentingan kekuatan dominan dalam masyarakat, bagaimana rutinitas media, nilai-nilai dan struktur organisasi bisa berjalan di dalamnya.</p> <p>2. Dalam level ideologi, tampak dari pemberitaan CNNIndonesia.com memberikan ruang bagi pernyataan-pernyataan yang menolak omnibus law. Berita dengan sentimen negatif kontra pemerintah dengan tidak mengakomodasi suara dari pemerintah.</p> <p>3. Dalam berita narasumber yang dihadirkan hanya satu yakni Sekretaris Jenderal KSPI, Riden Hatam Azis, menunjukkan statement informatif, deskriptif, dan menunjukkan sikap secara eksplisit kontra terhadap Omnibus Law.</p>

		<p>4. Dari segi komposisi narasumber. Hanya ada satu yakni Buruh, adalah pihak yang paling banyak diberi panggung oleh media. Sementara itu, pemerintah tidak mendapat ruang.</p> <p>5. Narasumber yang paling banyak berkontribusi pada sentimen negatif, Buruh adalah pihak yang paling berkepentingan atas adanya omnibus law.</p> <p>6. Terlihat komposisi kubu kontra omnibus law adalah Buruh.</p> <p>7. Dari sebaran topik pembahasan, hanya ada Buruh yang bisa diindikasikan adalah tidak terciptanya dialog antara Buruh dan Pemerintah.</p>
NO	JUDUL BERITA	ISI BERITA
5	Perluas Dukungan, Buruh Akan Angkat UU Ciptaker di Sidang ILO	Jakarta, CNN Indonesia -- Kelompok buruh salah satunya dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) berencana menggalang dukungan internasional menyuarakan tentang Cipta Kerja atau Omnibus Law UU Ciptaker. Sekretaris Jenderal (Sekjen) KSPI, Riden Azis merasa perlu mendapatkan dukungan lebih luas agar pemerintah segera mencabut Omnibus Law

	<p>CNN Indonesia   Senin, 09/11/2020 17:07 WIB</p> <p><a href="https://www.cn&lt;br/&gt;nindonesia.com/&lt;br/&gt;nasiona/202011&lt;br/&gt;09154126-20-&lt;br/&gt;567687/perluas-&lt;br/&gt;dukungan-&lt;br/&gt;buruh-akan-&lt;br/&gt;angkat-uu-&lt;br/&gt;ciptaker-di-&lt;br/&gt;sidang-ilo">https://www.cn nindonesia.com/ nasiona/202011 09154126-20- 567687/perluas- dukungan- buruh-akan- angkat-uu- ciptaker-di- sidang-ilo</a></p>	<p>UU Ciptaker. Ia mengklaim telah menjalin komunikasi dengan jaringan buruh internasional agar kontroversi penyusunan dan pengesahan beleid ini jadi salah satu pembahasan pada sidang Organisasi Buruh Sedunia atau ILO di Jenewa, Swiss. "Kami sudah komunikasi dengan teman-teman Internasional bahwa ini akan kami bawa ke sidang ILO dalam hal ini ke Jenewa sana," kata Riden di tengah aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR, Jakarta, Senin (9/11). Dia menerangkan, organisasinya menyiapkan setidaknya dua alasan yang kelak dibawa ke sidang, sebagai dasar argumen bahwa Omnibus Law UU Ciptaker layak dibatalkan. Pertama, kata Riden, beleid yang disahkan 5 Oktober lalu ini dinilai telah mendegradasi hak-hak buruh sebagai pekerja. Kedua, pengesahan UU ini dianggap menyalahi prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan. "Dua hal ini lah argumentasi di dunia internasional, untuk meminta dukungan membantu menekan pemerintah membatalkan Omnibus Law," kata dia. Adapun prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011. Penyusunan hingga pengesahan Omnibus Law UU Ciptaker dianggap mengandung banyak masalah, salah</p>
--	---	---

		<p>satunya mengabaikan asas keterbukaan yang menjadi bagian dari proses pembentukan perundangan. Kritik terhadap peraturan yang memuat 15 bab dan 186 pasal tersebut di antaranya soal ketiadaan draf awal. Padahal, draf wajib disebarluaskan sesuai Pasal 5 Undang-undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan dipertegas melalui Pasal 170 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014. Belum lagi, belakangan muncul pula beberapa versi draf dengan perbedaan jumlah halaman. Tak hanya dari elemen buruh, catatan mengenai amburadulnya proses perundangan ini getol juga diutarakan sejumlah pakar hukum. Riden lantas menegaskan, elemen buruh bakal terus mengupayakan segala cara agar pemerintah mencabut atau merevisi Omnibus Law UU Ciptaker. Buruh, kata dia, juga akan terus menggelar unjuk rasa, baik di DPR dan dekat Istana hingga pemerintah memenuhi tuntutan. Di DPR, lanjut dia, buruh akan terus menggelar aksi pada setiap agenda sidang paripurna sampai anggota parlemen melakukan legislative review. Kelompok buruh juga bakal mengawal setiap persidangan judicial review di Mahkamah Konstitusi, setelah gugatan uji materi turut dilayangkan pada 2 November lalu. "Ketika</p>
--	--	--

		<p>sidang dilakukan kami pastikan seluruh Indonesia kawan-kawan buruh akan mengikuti menyaksikan sidang tersebut," kata Riden. Aksi lanjutan menuntut pembatalan UU Omnibus Law terus digelar buruh. Selain menuntut pencabutan Omnibus Law UU Ciptaker, mereka juga meminta pemerintah menaikkan upah minimum 2021. Tak hanya buruh, elemen mahasiswa menyatakan bakal terlibat dalam aksi serupa di Istana pada Selasa (10/11) besok. Diperkirakan bakal ada setidaknya seribu mahasiswa yang tergabung dalam Komite Revolusi Pendidikan Indonesia (KRPI) bakal menyuarakan tuntutan pencabutan Omnibus Law UU Ciptaker di sekitar Istana Negara. "Ada 9 kampus yang sudah konfirmasi, kemungkinan ada 14 kampus yang ikut. Setiap kampus 2 Metromini. Kalau 1 Metromini sekitar 40-50 orang, sekitar seribu, belum termasuk massa cair," kata Humas KRPI Abia Indou kepada CNNIndonesia.com, Senin (9/11).</p>
	<p>Faktor Individual.</p>	<p>1. Faktor ini mempengaruhi isi terkait latar belakang profesional dari pengelola media, khususnya para wartawan dan editor. Pengaruh aspek-aspek personal dari pengelola media, aspek-aspek pribadi dari</p>

		<p>wartawan ikut mempengaruhi pemberitaan yang akan ditampilkan kepada khalayak.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>2. Dalam latar belakang pengelola media, tidak terlihat dalam tulisan pemberitaan.</li><li>3. Dalam pemberitaan diatas, CNNIndonesia.com memberikan ruang bagi pernyataan-pernyataan yang menolak omnibus law.</li><li>4. Berita diatas merupakan sentimen negatif kontra pemerintah dengan tidak mengakomodasi suara dari pemerintah.</li><li>5. Dalam berita narasumber yang dihadirkan dua yakni Sekretaris Jenderal KSPI, Riden Hatam Azis dan Humas KRPI Abia Indou yang menunjukkan statement informatif, deskriptif, dan menunjukkan sikap secara eksplisit kontra terhadap Omnibus Law.</li><li>6. Pemberitaan diatas yakni CNNIndonesia.com, belum menjadi ruang dialogis atas polemik Omnibus Law.</li><li>7. Dari segi komposisi narasumber berita diatas. Hanya ada satu yakni Buruh, adalah pihak yang paling banyak diberi panggung oleh media. Sementara itu,</li></ol>
--	--	---

		<p>pemerintah tidak mendapat ruang.</p> <p>8. Narasumber yang paling banyak berkontribusi pada sentimen negatif, Buruh adalah pihak yang paling berkepentingan atas adanya omnibus law.</p> <p>9. Terlihat komposisi kubu kontra omnibus law adalah Buruh.</p> <p>10. Dari sebaran topik pembahasan, hanya ada Buruh yang bisa diindikasikan adalah tidak terciptanya dialog antara Buruh dan Pemerintah.</p>
	<p>Rutinitas Media.</p>	<p>1. Faktor ini berhubungan dengan mekanisme dan proses penentuan berita. Setiap media umumnya mempunyai ukuran sendiri tentang apa yang disebut berita, apa ciri-ciri berita yang baik, atau apa kriteria kelayakan berita. Ukuran tersebut adalah rutinitas yang berlangsung tiap hari dan menjadi prosedur standar bagi pengelola media yang berada di dalamnya. Rutinitas media ini juga berhubungan dengan mekanisme bagaimana berita dibentuk. Ketika ada sebuah peristiwa penting yang harus diliput, bagaimana bentuk pendelegasian</p>

		<p>tugasnya, melalui proses dan tangan siapa saja tulisan sebelum sampai ke proses cetak atau pesan elektronik, siapa penulis, editor dan sebagainya.</p> <p>2. Dalam mekanisme atau proses penentuan berita, tampak berita CNNIndonesia.com merupakan berita online yang menuntut kecepatan dalam pemberitaan. Terlihat mekanisme dan proses, yakni terlihat judul, nama wartawan peliput, dan editor pada berita.</p>
	Organisasi media.	<p>1. Faktor ini masuk dalam level organisasi berhubungan dengan struktur organisasi yang bisa mempengaruhi pemberitaan. Pengelola media dan wartawan bukan orang tunggal yang ada dalam organisasi berita, sebaliknya hanya bagian kecil dari organisasi media itu. Masing-masing komponen dalam organisasi media bisa jadi mempunyai kepentingan sendiri-sendiri.</p> <p>2. Dalam organisasi media, terlihat susunan organisasi CNNIndonesia.com dalam website, namun tidak dalam tulisan yang sedang diulas.</p>



	<p>Pengaruh ekstra media.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Faktor yang mempengaruhi content media antara lain sumber-sumber informasi yang dijadikan isi media (kelompok kepentingan dalam masyarakat), sumber-sumber pendapatan media (pengiklan dan khalayak) serta institusi sosial lainnya.</li> <li>2. Dalam pengaruh ekstra media, tidak terlihat kelompok kepentingan di dalam pemberitaannya..</li> </ol>
	<p>Level ideologi.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pada tingkat ideologi, bagaimana media berfungsi sebagai kepanjangan tangan kepentingan kekuatan dominan dalam masyarakat, bagaimana rutinitas media, nilai-nilai dan struktur organisasi bisa berjalan di dalamnya.</li> <li>2. Dalam level ideologi, tampak dari pemberitaan CNNIndonesia.com memberikan ruang bagi pernyataan-pernyataan yang menolak omnibus law. Berita dengan sentimen negatif kontra pemerintah dengan tidak mengakomodasi suara dari pemerintah.</li> <li>3. Dalam berita narasumber yang dihadirkan dua yakni Sekretaris Jenderal KSPI, Riden Hatam Azis dan Humas KRPI Abia Indou,</li> </ol>

		<p>menunjukkan statement informatif, deskriptif, dan menunjukkan sikap secara eksplisit kontra terhadap Omnibus Law.</p> <p>4. Dari segi komposisi narasumber. Hanya ada satu yakni Buruh, adalah pihak yang paling banyak diberi panggung oleh media. Sementara itu, pemerintah tidak mendapat ruang.</p> <p>5. Narasumber yang paling banyak berkontribusi pada sentimen negatif, Buruh adalah pihak yang paling berkepentingan atas adanya omnibus law.</p> <p>6. Terlihat komposisi kubu kontra omnibus law adalah Buruh.</p> <p>7. Dari sebaran topik pembahasan, hanya ada Buruh yang bisa diindikasikan adalah tidak terciptanya dialog antara Buruh dan Pemerintah.</p>

Berdasarkan pembahasan diatas, maka dapat diperoleh hasil analisa yang disajikan oleh CNNIndonesia.com didasarkan dengan Teori yang

dikemukakan oleh Teori Hirarki Pengaruh Pamela J Shoemaker dan Stephen D. Reese (Pamela J Shoemaker dan Stephen D. Reese 1996)

Dalam Faktor Individual,

1. Mengenai latar belakang pengelola media CNNIndonesia.com, tidak terlihat dalam tulisan pemberitaan.
2. Dalam pemberitaan-pemberitaan yang ada, CNNIndonesia.com tampak memberikan ruang bagi pernyataan-pernyataan yang menolak omnibus law.
3. Pemberitaan CNNIndonesia.com mengenai omnibus law merupakan sentimen negatif kontra pemerintah dengan tidak mengakomodasi suara dari pemerintah.
4. Narasumber yang dihadirkan sebanyak satu hingga dua orang setiap berita yang menunjukkan statement informatif, deskriptif, dan menunjukkan sikap secara eksplisit kontra terhadap Omnibus Law.
5. CNNIndonesia.com, belum menjadi ruang dialogis atas polemik Omnibus Law.
6. Dari segi komposisi narasumber berita CNNIndonesia.com, hanya menampilkan Buruh, sebagai pihak yang paling banyak diberi panggung oleh CNNIndonesia.com. Sementara itu, narasumber pemerintah tidak mendapat ruang. Narasumber yang paling banyak berkontribusi pada sentimen negatif, Buruh dianggap pihak yang paling berkepentingan atas adanya omnibus law.

7. Dari sebaran topik pembahasan, hanya ada Buruh yang bisa diindikasikan adalah tidak terciptanya dialog antara Buruh dan Pemerintah.

#### Rutinitas Media.

1. Faktor ini berhubungan dengan mekanisme dan proses penentuan berita. Setiap media umumnya mempunyai ukuran sendiri tentang apa yang disebut berita, apa ciri-ciri berita yang baik, atau apa kriteria kelayakan berita. Ukuran tersebut adalah rutinitas yang berlangsung tiap hari dan menjadi prosedur standar bagi pengelola media yang berada di dalamnya. Rutinitas media ini juga berhubungan dengan mekanisme bagaimana berita dibentuk. Ketika ada sebuah peristiwa penting yang harus diliput, bagaimana bentuk pendelegasian tugasnya, melalui proses dan tangan siapa saja tulisan sebelum sampai ke proses cetak atau pesan elektronik, siapa penulis, editor dan sebagainya.
2. Dalam mekanisme atau proses penentuan berita, tampak berita CNNIndonesia.com merupakan berita online yang menuntut kecepatan dalam pemberitaan. Terlihat mekanisme dan proses, yakni terlihat judul, nama wartawan peliput, dan editor pada berita.

#### Organisasi media.

1. Faktor ini masuk dalam level organisasi berhubungan dengan struktur organisasi yang bisa mempengaruhi pemberitaan.

Pengelola media dan wartawan bukan orang tunggal yang ada dalam organisasi berita, sebaliknya hanya bagian kecil dari organisasi media itu. Masing-masing komponen dalam organisasi media bisa jadi mempunyai kepentingan sendiri-sendiri.

2. Dalam organisasi media, terlihat susunan organisasi CNNIndonesia.com dalam website, namun tidak dalam tulisan yang sedang diulas.

Pengaruh ekstra media.

1. Faktor yang mempengaruhi content media antara lain sumber-sumber informasi yang dijadikan isi media (kelompok kepentingan dalam masyarakat), sumber-sumber pendapatan media (pengiklan dan khalayak) serta institusi sosial lainnya.
2. Dalam pengaruh ekstra media, tidak terlihat kelompok kepentingan di dalam pemberitaannya.

Level ideologi.

1. Pada tingkat ideologi, bagaimana media berfungsi sebagai kepanjangan tangan kepentingan kekuatan dominan dalam masyarakat, bagaimana rutinitas media, nilai-nilai dan struktur organisasi bisa berjalan di dalamnya.
2. Dalam level ideologi, tampak dari pemberitaan CNNIndonesia.com memberikan ruang bagi pernyataan-pernyataan yang menolak omnibus law. Berita dengan sentimen negatif kontra pemerintah dengan tidak mengkomodasi suara dari pemerintah.

3. Dalam berita narasumber yang dihadirkan dua yakni Sekretaris Jenderal KSPI, Riden Hatam Azis dan Humas KRPI Abia Indou, menunjukkan statement informatif, deskriptif, dan menunjukkan sikap secara eksplisit kontra terhadap Omnibus Law.
4. Dari segi komposisi narasumber. Hanya ada satu yakni Buruh, adalah pihak yang paling banyak diberi panggung oleh media. Sementara itu, pemerintah tidak mendapat ruang.
5. Narasumber yang paling banyak berkontribusi pada sentimen negatif, Buruh adalah pihak yang paling berkepentingan atas adanya omnibus law.
6. Terlihat komposisi kubu kontra omnibus law adalah Buruh.
7. Dari sebaran topik pembahasan, hanya ada Buruh yang bisa diindikasikan adalah tidak terciptanya dialog antara Buruh dan Pemerintah.

#### Tanggung Jawab Sosial Media,

Media massa atau pers memiliki tanggung jawab kepada masyarakat dalam menjalankan fungsi-fungsi penting komunikasi massa dalam masyarakat. Maximillian T Hänska-Ahy (Maximillian T Hänska-Ahy 2012) mengorelasikan komunikasi publik dengan upaya pemerintah mendapatkan dukungan publik bagi setiap keputusan melalui diskusi, untuk memperoleh keputusan yang sah dari suatu kebijakan. Hal senada juga dikatakan Habermas (Muhammad Supraja 2018) yang mengingatkan agar setiap pihak mengedepankan komunikasi dan diskusi rasional dalam pengambilan keputusan.

Pemberitaan Omnibus law melalui media masa menyadarkan masyarakat dan memberikan berbagai informasi. Upaya yang bisa dilakukan media massa dalam *public sphere* yakni:

- 1) Media massa perlu mengadakan seleksi terhadap berbagai berita, hiburan, dan informasi yang di berikan agar tidak menimbulkan persepsi yang salah di msayarakat.
- 2) Media massa perlu mengedukasi masyarakat agar berperan aktif dalam Omnibus Law.
- 3) Media massa perlu mengedukasi masyarakat agar berhati-hati dalam mencerna pemberitaan Omnibus Law yang simpang siur.

## KESIMPULAN

Media CNNIndonesia.com punya peran sentral dalam pengetahuan harian warga, menyodorkan apa yang perlu/tidak perlu dibicarakan (agenda setting) dan bagaimana membincangkannya (framing). Sudah seharusnya dalam perannya itu media CNNIndonesia.com memiliki agenda pemberitaannya sendiri yang disusun secara independen dan berorientasi untuk melayani warga. Media CNNIndonesia.com seolah berperan sebagai pemilik panggung yang tampak punya kendali dominan atas laga apa yang tampil dan bagaimana ia ditampilkan. Pemberitaan yang muncul, tidak dilihat sebagai sikap dukungan media terhadap buruh, tapi lebih sebagai keberhasilan buruh dalam menginisiasi dan merebut panggung media. Artinya, buruh lebih proaktif. Hal ini juga terlihat dari kelompok buruh sebagai narasumber. Tampaknya, bukan media CNNIndonesia.com yang secara proaktif menyambangi buruh, melainkan karena ada momentum-

momentum yang diinisiasi oleh buruh itu sendiri, terutama lewat demonstrasi. Media CNNIndonesia.com bahkan sangat minim memberitakan bagaimana omnibus law RUU Cipta Kerja akan membahayakan kebebasan pers dan kerja-kerja jurnalistik itu sendiri. Hal ini semakin menguatkan bahwa media daring (CNNIndonesia.com) memang tak memiliki agenda.

## DAFTAR REFERENSI

- Fais Yonas Boa. 2020. "Omnibus Law: Sebuah Catatan Pinggir." 2020. [https://books.google.co.id/books?id=fBTUDwAAQBAJ&dq=omnibus+law&hl=id&source=gbs\\_navlinks\\_s](https://books.google.co.id/books?id=fBTUDwAAQBAJ&dq=omnibus+law&hl=id&source=gbs_navlinks_s).
- Jawahir Gustav Rizal. 2020. "Apa Itu Omnibus Law Cipta Kerja, Isi, Dan Dampaknya Bagi Buruh?" *Kompas.com* - 06/10/2020, 10:45 WIB. <https://www.kompas.com/tren/read/2020/10/06/104500965/apa-itu-omnibus-law-cipta-kerja-isi-dan-dampaknya-bagi-buruh?page=all>.
- Maximillian T Hänska-Ahy. 2012. "Who's Reporting The Protest?: Converging Practice Of Citizen Journalist And Two Bbc World Servis Newsrooms, From Iran's Election Protests To The Arab Uprisings." *LSE Research Online Journalism*(Journalism studies 13). [https://www.researchgate.net/publication/260137267\\_Who's\\_Reporting\\_the\\_Protests\\_Converging\\_practices\\_of\\_citizen\\_journalists\\_and\\_two\\_BBC\\_World\\_Service\\_newsrooms\\_from\\_Iran's\\_election\\_protests\\_to\\_the\\_Arab\\_uprisings](https://www.researchgate.net/publication/260137267_Who's_Reporting_the_Protests_Converging_practices_of_citizen_journalists_and_two_BBC_World_Service_newsrooms_from_Iran's_election_protests_to_the_Arab_uprisings).
- Muhammad Supraja. 2018. *Pengantar Metodologi Ilmu Sosial Kritis: Jurgen Habermas*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Pamela J Shoemaker dan Stephen D. Reese. 1996. *Mediating The Message*. New York: Longman Publisher.
- Radita Gora. 2015. *Hukum, Etika Dan Kebijakan Media (Regulasi, Praktik Dan Teori)*. Cetakan I. Yogyakarta: DEEPUBLISH.